

Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Binsar Sianipar¹, Audrey G. Tangkudung²

¹Universitas Indonesia, binsar.sianipar@ui.ac.id

²Universitas Indonesia, IBM ASMI, audreygdt2018@gmail.com

ABSTRAK

Sejak Maret 2020 Indonesia dinyatakan sebagai wilayah yang terdampak pandemi Covid-19. Virus Corona sebagai penyebab pandemi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seperti Italia, India, Iran dan Indonesia. Kondisi tersebut telah menempatkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, pada gerbang resesi ekonomi. Sejumlah kebijakan telah ditempuh Pemerintah Indonesia, antara lain menunjuk Menteri Pertahanan untuk menjaga ketahanan pangan nasional agar dapat bertahan dari resesi yang berpotensi datang melalui program food estate di Kalimantan Tengah. Atas dasar itulah, penelitian ini mengkaji pengembangan food estate di Kalimantan Tengah sebagai alternatif menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 melalui tiga perspektif, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan epistemologis berdasarkan empat pilar ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

Kata kunci: Ketahanan Pangan, Ketahanan Nasional, Food Estate

ABSTRACT

Since March 2020 Indonesia has been declared as an area that has been affected by the Covid-19 pandemic. The Corona virus as the cause of the pandemic, which was discovered for the first time in Wuhan, China, has quickly been spreading throughout the world such as Italy, India, Iran and Indonesia. This condition has put a number of countries in the world, including Indonesia, at the gates of economic recession. The Government of Indonesia has implemented a number of policies, including appointing the Minister for Defense to maintain national food security in order to survive from a recession that potentially coming through the food estate program in Central Kalimantan. On this basis, this study examines the development of food estates in Central Kalimantan as an alternative to maintaining food security amid the Covid-19 pandemic through three perspectives, namely economy, politics and security. The discussion was conducted qualitatively with an epistemological approach based on the four pillars of food security established by the World Food and Agriculture Organization (FAO), namely availability, access, utilization, and stability.

Keywords: Food Security, National Security, Food Estate

PENDAHULUAN

Pada bulan awal tahun 2020 Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah (Siagian, 2020).

Penerapan PSBB terbukti cukup berhasil menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 di beberapa daerah, terutama di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan *epicenter* pandemic Covid-19 di Indonesia (Sutrisno, 2020). Namun manfaat PSBB juga dibarengi dengan munculnya dampak ikutan berupa terganggunya perputaran roda ekonomi. Hal ini terjadi karena selama masa PSBB, ruang gerak dan mobilitas masyarakat dibatasi. Penerapan protokol kesehatan berupa *physical distancing* (menjaga jarak) membuat kegiatan ekonomi baik proses produksi, distribusi, dan konsumsi mengalami pembatasan.

Salah satu rantai kegiatan ekonomi yang terdampak serius adalah komoditas pangan. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan terganggu, baik menjadi terbatas atau berhenti sama sekali. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan, akses, utilisasi dan stabilitas bahan pangan masyarakat terganggu (Basundoro & Sulaeman, 2020). Apabila terjadi berkepanjangan, situasi ini akan membahayakan ketahanan pangan masyarakat dan dalam jangka Panjang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap situasi ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Menyikapi situasi tersebut Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menjadi *leading sector* dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui program *food estate*. Konsep *food estate* merupakan pengembangan pangan dalam skala luas yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, serta peternakan di suatu Kawasan (Santosa, 2014). Pengelolaan *food estate* itu nanti akan ditangani oleh prajurit TNI guna menghadapi ancaman biologi di masa akan datang seperti pandemi Covid-19. Untuk keperluan tersebut Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 165 ribu hektar di Kalimantan Tengah. Sebanyak 30 ribu hektar diprioritaskan untuk tanaman padi dan selebihnya untuk pengembangan singkong, jagung, serta komoditas lainnya sesuai kondisi lahan dan kebutuhan.

Program *food estate* ini dibuat untuk mengantisipasi krisis pangan seperti prediksi Badan Pangan Dunia (FAO) (Bhwana, 2020) dengan menjadikannya sebagai pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara. Program tersebut akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dan diharapkan akan mampu menjadi salah satu pilar penyangga ketahanan pangan nasional, termasuk guna berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional.

Keputusan Pemerintah mengembangkan program food estate ini patut mendapat apresiasi namun juga perlu dikritisi. Sebagai sebuah negara demokrasi setiap warga masyarakat memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa kritikan maupun saran, kepada para Pemerintah agar kebijakan yang diambil benar – benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Atas dasar pemikiran tersebut kajian ini menelaah pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah sebagai alternatif menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 dengan melalui tiga perspektif yaitu ekonomi, politik, dan keamanan.

LANDASAN TEORI

Pandemi Covid-19 dan Ketahanan Pangan

Penanganan pandemi Covid-19 telah menimbulkan masalah yang sangat kompleks antar berbagai sektor yang saling berkelindan seperti kesehatan, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keamanan nasional. Saat ini dua sektor yang terkait langsung dengan pandemi Covid-19 yaitu kesehatan dan ekonomi. Keduanya memerlukan perhatian serius dan menjadi agenda penting bagi negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah memiliki dua pilihan yang sangat sulit antara kepentingan kesehatan dan ekonomi, yaitu membendung penyebaran penyakit atau menghindari bencana krisis ekonomi, termasuk ketahanan pangan, yang berpotensi menyengsarakan orang miskin serta menimbulkan bencana kelaparan di dunia.

Sampai saat ini memang belum terjadi kekurangan bahan pangan pokok akibat Covid-19. Kegiatan di sektor pangan, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi, belum menghadapi gangguan yang berarti akibat pembatasan pergerakan orang atau perubahan permintaan makanan akibat penutupan restoran dan sekolah serta hilangnya pendapatan (Avisena, 2020). Namun demikian akibat pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh beberapa negara, arus perdagangan untuk bahan makanan pokok seperti gandum dan beras telah mengalami sedikit gangguan (Devereux et al., 2020).

FAO menetapkan empat kriteria pengukur ketahanan pangan yaitu: *availability*, *access*, *utility* dan *stability*. *Availability* mengukur ketersediaan pasokan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat; *access* mengukur kemampuan masyarakat dalam memperoleh bahan pangan yang dibutuhkan; *utility* menyangkut ukuran apakah masyarakat memiliki asupan nutrisi yang cukup dari pangan yang dikonsumsi; dan *stability* mengukur apakah masyarakat mampu mengakses pangan yang dibutuhkan setiap saat (Devereux et al., 2020; FAO, 2008).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian ini peneliti menggunakan kualitatif dengan pendekatan *positivist epistemology* (epistemologi positivis) berdasarkan empat pilar ketahanan pangan

(*food security*) yang ditetapkan Organisasi Pangan Dunia (*The Food and Agriculture Organization / FAO*) yaitu *availability*, *access*, *utilisation*, dan *stability* (FAO, 2008). Ada dua pertanyaan pokok penelitian yaitu: 1) bagaimanakah pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan nasional serta dampak ikutannya terhadap sektor ekonomi, politik dan keamanan suatu negara? 2) apakah pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah berpotensi mampu menjaga dan atau meningkatkan ketahanan pangan nasional Indonesia dalam masa pandemi, khususnya menjaga empat pilar ketahanan pangan yaitu *availability*, *access*, *utilisation*, dan *stability*?

Epistemologi positivis merupakan pendekatan penelitian yang melihat bukti yang dapat diamati sebagai satu-satunya bentuk temuan ilmiah yang dapat dipertahankan. Epistemologi positivis, oleh karena itu, mengasumsikan bahwa hanya fakta yang diturunkan dari metode ilmiah yang dapat membuat klaim pengetahuan yang sah (Jansen et al., 2008). Berdasarkan pendekatan tersebut maka untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menelaah berbagai literatur sebagai sumber utama data dan fakta yang dapat diandalkan serta relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan meliputi laporan resmi instansi Kementerian / Lembaga Pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog). Jurnal penelitian terkait ketahanan pangan, baik domestik maupun internasional, juga menjadi rujukan serta sumber lain yang relevan dan memenuhi kriteria sebagai rujukan dalam sebuah penelitian ilmiah.

Pembahasan diawali dengan tinjauan literatur terkait dampak pandemi, baik Covid-19 maupun wabah lain terhadap ketahanan pangan serta dampak ketahanan pangan terhadap kondisi ekonomi, politik dan keamanan nasional suatu negara. Beberapa studi kasus mengenai kedua topik tersebut digunakan sebagai contoh untuk memperkuat argumen bahwa pandemi suatu penyakit seperti Covid-19 terbukti berdampak serius terhadap ketahanan pangan suatu negara. Selain itu, ketahanan pangan suatu negara juga berdampak terhadap kondisi ekonomi, politik dan keamanan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya peneliti menyajikan data dan pembahasan mengenai pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah serta potensinya terhadap ketahanan pangan nasional dalam menghadapi pandemi, baik saat ini maupun dimasa mendatang. Sebagai penutup, sejumlah saran kebijakan untuk mendukung program pengembangan *food estate* di Kalteng disampaikan agar program tersebut sukses secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Availability

Ada tiga faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan pangan (*availability*) masyarakat yaitu produksi pertanian, distribusi, dan kegiatan ekspor-impor. Penurunan produksi pertanian pasti akan menyebabkan gangguan terhadap ketersediaan pangan, bahkan mungkin akan menyebabkan krisis pangan dan bencana kelaparan. Sejarah

mencatat bahwa wabah penyakit dapat berpengaruh terhadap produksi bahan pangan. Wabah flu burung atau flu babi Afrika yang terjadi pada tahun 2000an misalnya secara langsung mengurangi produksi makanan yang bersumber dari hewan karena wabah tersebut berpengaruh terhadap sektor peternakan (McElwain & Thumbi, 2017; Ntsomboh-Ntsefong et al., 2017).

Meskipun Covid-19 tidak menjangkiti ternak, seperti flu burung dan flu babi, tetapi tetap berpotensi mempengaruhi produksi pangan, terutama pangan nabati. Protokol kesehatan berupa *physical distancing* misalnya berpotensi mengganggu kegiatan pertanian, khususnya di daerah atau negara yang kegiatan pertanian masih mengandalkan tenaga manusia seperti Indonesia. Di negara maju kegiatan produksi bahan pangan pokok sebagian besar mengandalkan mesin sehingga hanya perlu sedikit tenaga kerja. Situasi ini membuat kegiatan produksi pertanian seperti persiapan lahan, menabur benih, dan memanen tidak terganggu. Namun penerapan mekanisasi skala besar lebih sulit atau terlalu mahal untuk bahan makanan non-pokok, seperti buah-buahan dan sayuran. Komoditas pertanian tersebut membutuhkan tangan manusia untuk menanam, menyiangi, dan memanen. Sektor pertanian padat karya ini secara langsung terpengaruh oleh protokol kesehatan akibat Covid-19 seperti *physical distancing*. Kegiatan pertanian yang memerlukan konsentrasi banyak pekerja misalnya menanam, menyiangi, dan memanen terganggu sehingga mengganggu produksi dan berpotensi mengganggu ketersediaan bahan pangan (Aday & Aday, 2020).

Faktor kedua yang mempengaruhi ketersediaan pangan adalah distribusi. Ditengah wabah Covid-19, Pemerintah di seluruh dunia telah memberikan prioritas tinggi terhadap rantai distribusi bahan pangan pokok. Kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa makanan pokok dapat sampai kepada konsumen dengan lancar. Pemerintah Indonesia misalnya, meskipun di beberapa daerah diterapkan PSBB sehingga pergerakan orang dan barang dibatasi, transportasi bahan pangan mendapat pengecualian (Radityasani, 2020). Kondisi ini membuat ketersediaan pangan tidak terganggu, terutama bahan pangan pokok yang relatif tahan lama.

Namun bukan berarti distribusi bahan pangan pokok dijamin lancar. Perusahaan pengolahan dan distributor makanan pokok, terutama yang mengandalkan banyak tenaga kerja manusia (*labour-intensive*) banyak yang mengalami gangguan operasional atau bahkan berhenti karena ada pekerja yang terinfeksi Covid-19. Bahkan sejumlah perusahaan pengolah atau distributor makanan di negara maju yang memiliki sedikit pekerja karena mengandalkan mesin juga mengalami situasi serupa (Halliday, 2020).

Kegiatan ekspor-impor juga berkontribusi terhadap ketersediaan pangan. Secara umum negara – negara di dunia memiliki kemampuan memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan pokok seperti beras, gandum dan jagung. Meskipun demikian saat ini perdagangan pangan antar negara merupakan hal yang wajar karena kebutuhan diversifikasi pasokan pangan yang beragam. Selain itu perdagangan antara negara, baik ekspor maupun impor, terjadi karena kelebihan produksi atau kebutuhan.

Dalam masa krisis banyak negara produsen pangan utama yang melakukan pembatasan ekspor bahan pangan pokok seperti beras dan gandum. Pembatasan itu dilakukan akibat ketakutan akan kekurangan yang akan terjadi atau kenaikan harga yang tajam untuk melindungi konsumen dalam negeri. Situasi seperti ini pernah terjadi misalnya pada masa krisis tahun 2008 dan 2010. Meskipun pembatasan tersebut dapat melindungi kepentingan nasional dalam jangka pendek, pembatasan tersebut mengurangi pasokan ke pasar dunia, memberikan tekanan pada harga dunia.

Pembatasan ekspor-impor pangan ini sempat muncul di tengah pandemic Covid-19. Sampai dengan tanggal 24 April 2020, 14 negara telah memberlakukan larangan ekspor terhadap 20 jenis produk makanan. Fakta tersebut sangat mengkhawatirkan karena pada tahun 2007, pembatasan perdagangan semacam itu menjadi penyumbang utama kenaikan dua kali lipat harga pangan dunia. Para analis menjelaskan bahwa mengingat pasokan pangan global yang melimpah, sebenarnya larangan ekspor adalah cara yang salah bagi pemerintah untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi yang berasal dari pandemi. Untungnya larangan ekspor makanan tersebut tidak meningkat secara substansial dalam beberapa minggu terakhir (Welsh, 2020).

Access

Pandemic Covid-19 berdampak serius dan bahkan bagi sebagian masyarakat merupakan ancaman terhadap kemampuan mereka untuk mendapatkan akses kepada pangan pokok. Situasi tersebut misalnya sebagai akibat dari hilang atau berkurangnya pendapatan karena kehilangan pekerjaan. Wabah Covid-19 telah membuat jutaan orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan. Ancaman terhadap pangan pokok tersebut terutama menimpa rumah tangga miskin yang menghabiskan sebagian prosentase dari pendapatan mereka untuk makanan seperti yang terjadi di negara – negara miskin di Afrika (Arndt et al., 2020).

Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund / IMF*) memproyeksikan penurunan 5% ekonomi dunia pada tahun 2020. Hal tersebut salah satunya merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Situasi ekonomi tersebut disebut sebagai lebih buruk dari krisis keuangan global tahun 2008-2009. Kejatuhan ekonomi di pusat-pusat awal pandemi yaitu Cina, Eropa, dan Amerika Serikat juga merugikan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui penurunan harga perdagangan, minyak, dan komoditas lainnya serta pembatasan perjalanan dan pengangkutan internasional, memperburuk biaya ekonomi dari pembatasan terkait COVID-19 di negara-negara miskin (IMF, 2020). Sebagian masyarakat Indonesia juga mengalami situasi semacam ini. Pemerintah menyebutkan bahwa pandemic Covid-19 telah menyebabkan warga miskin terpuruk dan kehilangan daya beli terhadap bahan pangan.

Utility

Berkurangnya ketersediaan dan akses terhadap makanan berpengaruh terhadap asupan gizi masyarakat. Seperti dijelaskan sebelumnya orang miskin menghabiskan Sebagian besar dari total pendapatan mereka untuk makanan pokok seperti gandum, beras, atau jagung. Akibatnya mereka hanya memiliki sedikit kemampuan untuk membeli untuk makanan non-pokok (non-staple) seperti buah-buahan, sayuran, dan produk hewani. Bukti survei terbaru dari Ethiopia menegaskan hal ini, menemukan bahwa pengurangan konsumsi makanan rumah tangga terutama terjadi pada makanan padat nutrisi seperti buah, daging, telur, dan susu. Pergeseran membatasi penurunan asupan kalori tetapi meningkatkan defisiensi konsumsi mikronutrien, dengan konsekuensi merugikan bagi kesehatan dan perkembangan manusia dalam jangka panjang. Gangguan terhadap pasokan buah-buahan, sayuran, susu, dan produk daging akibat wabah Covid-19 juga berpotensi mengurangi keragaman makanan, asupan zat gizi mikro, dan status gizi, meningkatkan risiko konsekuensi kesehatan yang merugikan (Laborde et al., 2020).

Stability

Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu. Instabilitas pangan bisa bersifat sementara, musiman, atau kronis. Situasi instabilitas pangan bisa terjadi akibat produksi pangan yang terganggu karena bencana alam seperti kekeringan atau wabah penyakit. Kekeringan misalnya sering kali mengakibatkan gagal panen dan penurunan ketersediaan pangan. Wabah penyakit juga menyebabkan produksi pangan terganggu sehingga terjadi instabilitas pangan. Wabah Covid-19 turut mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Situasi tersebut telah berimbas pada makin mahalnya harga kebutuhan barang pokok, termasuk bahan pangan, karena sebagian kebutuhan pokok masih bergantung dari impor (Sandy, 2020). Akibatnya stabilitas pangan menjadi terganggu dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan masyarakat

Ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi, Politik serta Keamanan Nasional

Ketahanan pangan suatu negara memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap sektor ekonomi, politik dan keamanan. Ketahanan pangan yang lemah akan turut berkontribusi menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya ketahanan pangan yang kuat juga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat lebih tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019 sektor pertanian menyerap 27,33 persen dari 133,56 angkatan kerja di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, yang merupakan penopang utama ketahanan pangan, merupakan penyumbang yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bahkan dalam Triwulan I 2020, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar ketiga dalam struktur PDB Indonesia dengan porsi 12,84 persen. Ini menunjukkan betapa penting pengaruh ketahanan pangan

terhadap ekonomi suatu negara, contohnya Indonesia (BPS, 2020).

Pertanian juga merupakan tempat dimana berbagi aspek perekonomian saling terkait satu sama lain. Peran penting pertanian dapat dilihat di bidang ekonomi dari tiga perspektif, 1) sebagai penyedia pangan bagi suatu bangsa dan input produksi bagi industri dalam negeri; 2) sebagai sumber pendapatan devisa; dan 3) menyediakan barang dan jasa di pasar dalam negeri dan internasional (Azam & Shafique, 2017).

Sektor pertanian sebagai kontributor utama dalam ketahanan pangan juga terbukti memberikan dampak luas kepada ekonomi suatu negara. Sebuah studi yang memberikan penilaian dampak ekonomi secara luas dari Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa memperkuat bukti tersebut. Hasil studi tersebut menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan produksi pertanian di negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Anggaran Uni Eropa akan meningkat secara signifikan dan transfer dari pembayar pajak Uni Eropa ke petani menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan di negara-negara di Kawasan tersebut (Bach et al., 2000).

Sejarah menunjukkan ketahanan pangan yang rapuh, misalnya akibat kelangkaan pangan atau harga pangan yang tinggi, mudah berimbas pada situasi politik suatu negara. Rakyat yang lapar sangat mudah tersulut dan melakukan Gerakan melawan pemerintah. Indonesia pernah mengalami situasi tersebut pada masa Pemerintahan Presiden Sukarno. Pada 1966 masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terutama bahan pangan. Kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat sulit diperoleh dan harganya mahal akibat inflasi yang sangat tinggi. Dalam situasi tersebut rakyat mengajukan tuntutan (Tritura) kepada Pemerintah. Salah satunya adalah penurunan harga. Pada akhirnya situasi politik yang tidak kondusif tersebut membawa kepada kejatuhan Sukarno. Hal serupa juga terjadi pada masa Pemerintahan Suharto pada tahun 1998. Krisis ekonomi pada akhir masa Pemerintahan Suharto menjadi salah satu factor pemicu lengsernya Presiden Suharto setelah berkuasa lebih dari 32 tahun (Santosa, 2014).

Revolusi rakyat yang terjadi di Mesir pada masa Pemerintahan Presiden Hosni Mubarak dan di Libya pada masa Pemerintahan Muammar Gaddafi salah satunya bersumber pada ketahanan pangan yang rapuh di negeri tersebut. Memang kesulitan mendapatkan bahan pangan bukan merupakan satu – satunya sumber gejolak politik dan keamanan di kedua negara tersebut. Dari beberapa faktor yang menyebabkan revolusi di kedua negara tersebut, melemahnya ketahanan pangan secara drastis menyebabkan menghabiskan kesabaran masyarakat yang resah karena melonjaknya harga gandum secara besar-besaran (Veninga & Ihle, 2018).

Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Solusi Alternatif

Berkaca dari peristiwa sejarah tersebut langkah Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19 patut diapresiasi. Meskipun dampak wabah tersebut saat ini belum sampai mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di sektor ekonomi, politik dan keamanan, namun bila tidak

dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini akan menimbulkan kerawanan di masa depan Ketika terjadi pandemi. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejarah mencatat bahwa dunia sudah pernah dilanda beberapa kali pandemi yang cukup besar sebelumnya dan berdampak serius terhadap ketahanan pangan serta berimbas pada kehidupan ekonomi, politik dan situasi keamanan nasional suatu bangsa. Diperkirakan pandemi semacam Covid-19 akan terulang kembali di masa mendatang sehingga program *food estate* tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan ketahanan pangan pada masa sulit tersebut. Namun apakah program *food estate* di Kalimantan Tengah ini merupakan solusi alternatif yang layak dan mampu menjaga ketahanan pangan nasional dimasa pandemi seperti sekarang ini?

Dalam masa pandemi Covid-19, jumlah masyarakat miskin akan bertambah menjadi 50 juta orang (Siburian, 2020). Oleh karena itu Pemerintah Jokowi bertindak cepat dengan membentuk Tim Satgas Khusus Pengadaan Pangan melalui program *Food Estate* untuk mengantisipasi penyediaan pangan bagi paling tidak 50 juta warganya yang kurang mampu atau yang terdampak krisis ini. Tim yang dibuat akan segera membuat persiapan dan perhitungan kebutuhan dana dan lokasi guna mengimplementasikan proyek dengan durasi 12 bulan. Target program tersebut adalah membangun *food estate* seluas 20 ribu hektar untuk penanaman padi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Lahan seluas 20 ribu akan digunakan sebagai area sawah untuk penanaman padi. Data BPS 2020 menyebutkan rata – rata produktifitas lahan sawah di Indonesia adalah 3ton (3000 kilogram) beras / hektar (Statistik, 2020). Berdasarkan perhitungan tersebut maka satu hektar lahan sawah akan menghasilkan 3000 kilogram beras sehingga lahan *food estate* seluas 20 ribu hektar akan menghasilkan 60 juta kilogram beras. Hasil ini diperoleh dalam waktu 4 bulan. Berdasarkan data BPS, konsumsi beras rata – rata masyarakat Indonesia adalah 0,2 kilogram per hari (Statistik, 2020) atau satu kilogram beras mampu makan sekitar 5 orang per hari. Artinya 60 juta kilogram beras mampu memberi makan 50 juta orang selama enam hari.

Berdasarkan data dari BPS, biaya produksi tanaman padi sekitar Rp. 13,6 juta per hektar sehingga 20 ribu hektar lahan sawah memerlukan biaya sekitar Rp 272 miliar. Hasilnya masih dalam bentuk gabah sehingga memerlukan biaya untuk memproses menjadi beras. Adapun biaya penggilingan padi agar menjadi beras biasanya dibayar secara natura yaitu 10 persen dari jumlah beras yang dihasilkan dari proses penggilingan. Jadi bila pihak penggilingan memproses padi sehingga menghasilkan 100 kilogram beras maka pemilik padi akan menyerahkan 10 kilogram beras tersebut kepada pemilik penggilingan padi (Momongan et al., 2019).

Menurut BPS, harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan pada bulan Juni 2020 adalah Rp. 9.500. Berdasarkan data tersebut maka biaya pengolahan padi menjadi beras per hektar adalah 3000 kilogram x Rp. 9500 = 2.850.000. Jadi total biaya produksi dari benih sampai menjadi beras adalah Rp. 13,6 juta (biaya produksi padi) ditambah Rp. 2.850.000 (biaya penggilingan) = Rp. 16.450.000 per hektar. Sehingga pengolahan lahan *food estate*

seluas 20 ribu hektar yang menghasilkan beras sebanyak 60 ribu ton diperlukan biaya adalah 20 ribu hektar x Rp. 16.450.00 = Rp. 329 miliar.

Dengan asumsi lahan tersebut dapat ditanami padi dua kali dalam setahun maka diperlukan biaya Rp. 658 miliar per tahun untuk pengolahan lahan padi *food estate* Kalteng selama setahun guna menghasilkan 120 ribu ton beras. Jumlah produksi beras tersebut tentu masih kurang karena hanya mampu memberi makan 50 juta warga kurang mampu selama 12 hari. Namun hal tersebut bukan masalah karena Pemerintah memiliki lahan di beberapa wilayah Indonesia yang sangat luas dan potensial untuk digunakan sebagai *food estate*. Di Kalteng sendiri masih ada 10 ribu hektar lahan di Kabupaten Pulau Pisang yang juga berpotensi dikembangkan menjadi *food estate*.

Pemerintah juga berencana membangun *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan fokus tanaman seperti cabai, bawang putih, dan kentang khusus industri. Terdapat 30 ribu hektar lahan yang memiliki potensi sebagai lahan *food estate*. Namun dalam tahap awal Pemerintah baru akan mengembangkan pada area seluas 4.000 hektar. Dalam program ini Pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan BUMN yang telah berminat untuk berinvestasi dalam pengembangan lahan sekaligus penyerap hasil panen petani (Nasution, 2020).

Analisa terhadap *food estate* Kalteng sebagai sentra penghasil makanan pokok, yaitu beras, menunjukkan bahwa potensi tersebut cukup baik dan bila segera dilaksanakan akan memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Memang potensi produksi beras dari program tersebut yakni sekitar 120 ribu ton per tahun masih sangat kecil dibandingkan dengan total produksi beras nasional yaitu sekitar 31,3 juta ton per tahun. Namun bila program tersebut berhasil dan dapat dijadikan sebagai percontohan bagi pengembangan *food estate* di wilayah lain di Indonesia maka dampaknya akan sangat besar. Program tersebut bila dapat dilaksanakan secara *massive* tidak saja akan meningkatkan produksi bahan pangan nasional secara signifikan tetapi juga akan menjadikan Indonesia lebih mandiri (*self-reliant*) dalam bidang pangan. Kedua hal tersebut, peningkatan produksi dan kemandirian, memiliki arti sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan karena akan menjaga *availability* dan *stability* serta memberikan *access* yang lebih baik terhadap bahan pangan bagi masyarakat.

Hal serupa juga berlaku untuk *food estate* hortikultura yang akan dikembangkan di Sumut. *Availability*, *access*, dan *stability* produk pangan non-pokok seperti buah dan sayuran tentu akan membuat asupan nutrisi dan gizi masyarakat meningkat. Kondisi ini jelas akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terutama dilihat dari perspektif *utility* bahan pangan.

PENUTUP

Namun program *food estate* tersebut perlu waktu yang cukup lama. Kegiatan administrasi menyangkut legalitas lahan, penyiapan *business plan*, SDM, sarana dan prasarana produksi serta hal teknis lainnya pasti memerlukan waktu. Diperkirakan paling tidak butuh satu atau dua tahun untuk penyiapan sampai dapat berproduksi. Padahal pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan tidak ada yang bisa memprediksi pasti kapan akan berakhir. Kondisi tersebut membuat program *food estate* memerlukan program penyerta sebagai *interim-program* untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sebelum *food estate* berproduksi penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aday, S., & Aday, M. S. (2020). Impacts of COVID-19 on food supply chain. *Food Quality and Safety*.
- Arndt, C., Davies, R., Gabriel, S., Harris, L., Makrelov, K., Robinson, S., Levy, S., Simbanegavi, W., van Seventer, D., & Anderson, L. (2020). Covid-19 lockdowns, income distribution, and food security: An analysis for South Africa. *Global Food Security*, 26, 100410.
- Avisena, M. I. R. (2020, March 19). Stok Pangan Aman Hingga Lebaran, Tapi Gula Menipis. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/297732-stok-pangan-aman-hingga-lebaran-tapi-gula-menipis>
- Azam, A., & Shafique, M. (2017). Agriculture in Pakistan and its Impact on Economy. *A Review. Inter. J. Adv. Sci. Technol*, 103, 47–60.
- Bach, C. F., Frandsen, S. E., & Jensen, H. G. (2000). Agricultural and Economy-Wide Effects of European Enlargement: Modelling the Common Agricultural Policy. *Journal of Agricultural Economics*, 51(2), 162–180.
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(2).
- Bhwana, P. G. (2020, April 13). FAO Warns COVID-19 Pandemic Can Cause Global Food Crisis. *Tempo*. <https://en.tempo.co/read/1392904/three-more-doctors-died-of-covid-19-bringing-death-toll-to-130-idi>
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Devereux, S., Béné, C., & Hoddinott, J. (2020). Conceptualising COVID-19's impacts on household food security. *Food Security*, 12(4), 769–772.
- FAO, A. (2008). An introduction to the basic concepts of food security. *FAO, Rome, Italy*.
- Halliday, J. (2020, June 19). Three food factories in England and Wales close over coronavirus. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/business/2020/jun/19/three-meat-factories-in-england-and-wales-closed-over-coronavirus>

- IMF, J. (2020). A crisis like no other, an uncertain recovery. *World Economic Outlook Update*.
- Jansen, B. J., Spink, A., & Taksa, I. (2008). *Handbook of research on web log analysis*. IGI Global.
- Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J., & Vos, R. (2020). Covid-19 risks to global food security. *Science*, 369(6503), 500–502.
- McElwain, T., & Thumbi, S. (2017). Animal pathogens and their impact on animal health, the economy, food security, food safety and public health. *Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics)*, 36(2), 423.
- Momongan, J. F., Ruauw, E., & Benu, N. M. (2019). Analisis Keuntungan Usaha Penggilingan Padi “Sederhana” Di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 1(1).
- Nasution, D. D. (2020, July 17). Kementan Garap Proyek Food Estate Hortikultura Sumut. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/qdlr12380/kementan-garap-proyek-food-estate-hortikultura-sumut>
- Ntsomboh-Ntsefong, G., Shariati, M. A., Khan, M. U., & Karapetkovska-Hristova, V. (2017). Incidence of avian flu shocks on poor household livelihoods of poultry farmers in Africa. *International Journal of Avian & Wildlife Biology (IJAWB)*, 2(1), 7–11.
- Radityasani, M. F. (2020, September 4). PSBB Jakarta, Pengiriman Logistik Tetap Jalan Penulis: Muhammad Fathan Radityasani Editor: Agung Kurniawan D [Review of *PSBB Jakarta, Pengiriman Logistik Tetap Jalan Penulis: Muhammad Fathan Radityasani Editor: Agung Kurniawan D*, by A. Kurniawan]. *Kompas*. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/09/074200715/psbb-jakarta-pengiriman-logistik-tetap-jalan>
- Sandy, F. (2020, March 24). Corona & Dolar Picu Masalah Baru: Lonjakan Harga Pangan! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200324182436-4-147355/corona-dolar-picu-masalah-baru-lonjakan-harga-pangan>
- Santosa, E. (2014). Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 1(2), 80–85.
- Siagian, H. (2020, March 31). Presiden Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/300209-presiden-jokowi-tetapkan-pembatasan-sosial-berskala-besar>
- Siburian, D. (2020, May 14). Menko PMK Prediksi Jumlah Orang Miskin Tembus 50 Juta Orang! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200514185420-4-158592/menko-pmk-prediksi-jumlah-orang-miskin-tembus-50-juta-orang>
- Statistik, B. P. (2020). *Statistik Indonesia 2020 (1101001)*.
- Sutrisno, B. (2020, April 27). Govt claims Jakarta, epicenter of Indonesia’s COVID-19 outbreak, has flattened the curve. *The Jakarta Post*.
- Veninga, W., & Ihle, R. (2018). Import vulnerability in the Middle East: Effects of the Arab spring on Egyptian wheat trade. *Food Security*, 10(1), 183–194.
- Welsh, C. (2020). *Covid-19 and Food Security*. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/programs/global-food-security-program/covid-19-and-food-security>